

Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Bima

Ahmad Sopian Romzi¹, Anggun Purnama², Alan musadab³, Inka Nusamuda Pratama⁴

^{1,2,3,4} Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram
Anggunpurnama457@gmail.com romziahmad308@gmail.com

Keywords:

Inequality¹
Economy²
Poverty³
Social⁴

Abstract: This research aims to determine the effect of economic inequality on the level of poverty in Bima City. The research method used is a descriptive study by utilizing secondary data, namely from articles, journals, the internet, as well as literature studies, as well as estimates based on information available from various trusted sources. Results. The analysis shows that there is a significant positive relationship between the level of economic inequality and the level of poverty. This means that the higher the level of economic inequality, the higher the level of poverty in the city of Bima. This finding has important implications for sustainable and inclusive economic development policies in the city of Bima, by emphasizing the need for efforts to reduce economic inequality as an effort to reduce the level of poverty.

Kata Kunci:

Ketimpangan¹
Ekonomi²
Kemiskinan³
Sosial⁴

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan ekstrapolasi studi literatur berdasarkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, terutama data sekunder dari artikel, jurnal, dan internet. Hasil Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat ketimpangan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin besar kesenjangan ekonomi maka semakin tinggi pula angka kemiskinan di Kota Bima. Temuan ini mempunyai implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Kota Bima, karena menyoroti perlunya upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Article History:

Received: 30-05-2024

Online : 22-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Isu Kemiskinan adalah masalah serius di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan telah menurun secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, namun masih terdapat jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan (Istiqamah et al., 2018). Secara umum Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan

krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau stakeholder untuk mengatasi persoalan besar ini. (Fardi et al., 2023)

(Pratama, 2023b) Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang melibatkan sejumlah faktor yang saling terkait. Ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial budaya yang memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, norma sosial, dan peluang dalam masyarakat. Di samping itu, dimensi politik juga memiliki peran penting, karena ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan politik dapat memperburuk kemiskinan dengan menghasilkan kebijakan yang tidak memadai untuk mengatasi masalah ini. Terakhir, kemiskinan juga terkait erat dengan dimensi partisipasi, dimana individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali memiliki keterbatasan dalam partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, perlu pendekatan yang komprehensif yang memperhitungkan semua dimensi ini dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

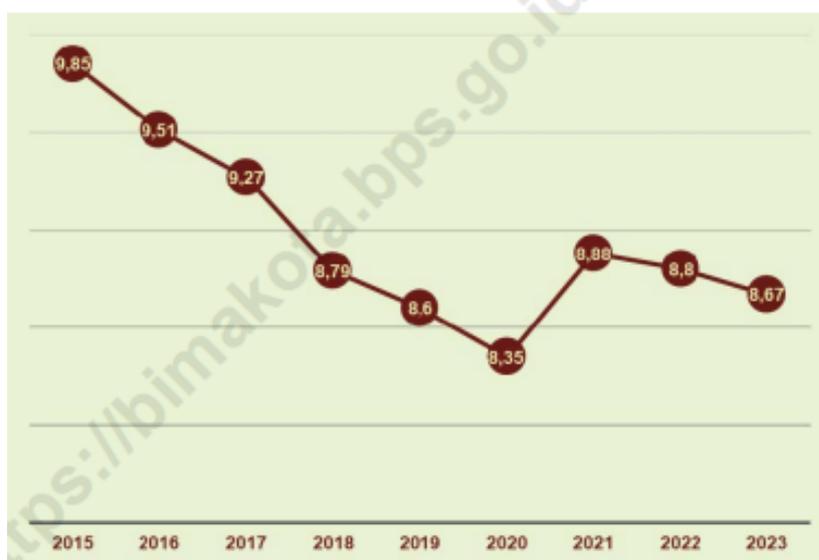
Kemiskinan penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, kondisi alamiah dan ekonomi seperti bencana alam, kekurangan sumber daya alam, atau fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi pendapatan dan kesejahteraan individu atau komunitas, menjadikannya rentan terhadap kemiskinan. Kedua, faktor kondisi struktural dan sosial, seperti kurangnya akses ke pendidikan berkualitas, lapangan kerja yang terbatas, atau sistem ekonomi yang tidak merata, dapat menciptakan hambatan bagi individu untuk melampaui batas kemiskinan (Pratama, 2023c). Terakhir, faktor kondisi kultural juga berperan, di mana norma-norma budaya tertentu dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan ekonomi dan masyarakat. Misalnya, norma yang menghargai pekerjaan tertentu atau peran gender dapat mempengaruhi peluang ekonomi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kemiskinan memerlukan analisis yang mempertimbangkan peran faktor-faktor alamiah, ekonomi, struktural, sosial, dan budaya dalam membentuk kondisi kemiskinan (Pratama, 2023a).

(Mardinsyah & Sukartini, 2020) Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi didefinisikan sebagai ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Ketimpangan ekonomi memiliki dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena ketimpangan ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat miskin.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang masih banyak menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi, seperti tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan daerah yang kecil, rendahnya pertumbuhan

ekonomi dan juga rendahnya perkembangan diberbagai sektor kegiatan terutama pendidikan dan kesehatan(Kebijakan & Kemiskinan, 2008). khusus di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menjadi salah satu penyebab utama tingkat kemiskinan yang signifikan. Ketimpangan tersebut dapat tercermin dalam perbedaan akses terhadap lapangan kerja yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi di dalam kota tersebut.Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan di Kota Bima dan daerah-daerah sejenis, penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan dan peluang yang lebih merata.(Di & Penanae, 2021)Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, pekerjaan yang layak, serta pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan program-program perlindungan sosial dan bantuan bagi kelompok-kelompok rentan juga dapat membantu mengurangi dampak buruk dari ketimpangan ekonomi terhadap kemiskinan.

Kota Bima merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bima menyebutkan bertambah atau mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2021 ke 2022 dan tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan Dikutip dari data BPS.go.id, jumlah penduduk miskin Kota Bima tahun 2022 mencapai 16,44 ribu jiwa. Angka tersebut bertambah jika dibandingkan pada tahun 2021 sebelumnya, yakni jumlahnya hanya mencapai 16,22 ribu jiwa.Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bima dikutip dari BPS Provinsi NTB, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 sebelumnya. TPT tahun 2020 mencapai 8,35 sedangkan tahun 2021 sebanyak 8,88.Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat, tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tahun 2023 mencapai 8,67%



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis metode studi kepustakaan (library research) (Inka Nusamuda Pratama Siti Rahmawati, 2023) Metode studi kepustakaan mengacu pada teori maupun hasil dari beberapa literatur-literatur ilmiah seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun peraturan pemerintah. Adapun tahapan dalam penelitian studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca, menganalisis, mengelolah serta membuat kesimpulan sebagai bahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan ekonomi

(Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021) Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Ketimpangan ekonomi adalah fenomena sosial yang kompleks yang mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di suatu masyarakat. Fenomena ini sering kali dilihat dalam bentuk statistik seperti koefisien Gini, yang memberikan gambaran tentang seberapa besar kesenjangan ekonomi dalam suatu populasi. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk pendapatan individu, kekayaan rumah tangga, akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ekonomi dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap masyarakat, termasuk peningkatan ketegangan sosial, penurunan kohesi sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sayekti & Penelitian, 2017).

Kabupaten/Kota Bima, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Meskipun kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, daerah ini juga menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan ekonomi. Secara khusus, ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bima dapat tercermin dalam disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan wilayah pedesaan sering kali mengalami akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, ketimpangan juga dapat tercermin dalam kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, seperti pengusaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar, serta dalam akses terhadap layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan pasar. Dengan memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bima, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kondisi kesehatan sering kali buruk, banyak sekali diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, menganggur, dan prospek untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik sangat suram. Pendidikan memegang peran kunci dalam menentukan tingkat kemiskinan di Kota Bima. (Salwa Fadhilah Haya et al., 2022) Penelitian ini menjadi salah satu parameter bahwa pendidikan yang rendah seringkali menjadi faktor penting yang membatasi akses penduduk

ke peluang pekerjaan yang lebih baik. Anak-anak dan remaja yang tidak memiliki akses atau akses yang terbatas ke pendidikan berkualitas seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk mereka pecahkan. Mereka cenderung terbatas dalam pilihan pekerjaan yang tersedia, yang seringkali adalah pekerjaan dengan upah rendah dan tidak stabil. Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan penduduk menjadi prioritas dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Penting untuk mencatat bahwa peran pendidikan tidak hanya terbatas pada tingkat pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, kualitas pendidikan juga menjadi faktor krusial. Dalam rangka mengatasi kemiskinan, perlu adanya pembaruan dalam sistem pendidikan di Kota Bima. (Sumberdaya, n.d.) Ini termasuk perbaikan dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang berkualitas, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pembaruan ini akan membantu memastikan bahwa anak-anak dan remaja menerima pendidikan berkualitas yang akan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang lebih baik dan memberikan peluang untuk meraih pendapatan yang lebih layak.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima, 2016–2023. Garis kemiskinan tahun 2016 di angka 293.048 sedangkan di jumlah penduduk miskin 15,42 dan di persentase penduduk miskin 9,51 dan di tahun 2017 di angka 299.346 sedangkan di jumlah penduduk miskin 15,36 dan di persentase penduduk miskin 9,27 dan di tahun 2018 di angka 323.187 sedangkan di jumlah penduduk miskin 14,86 dan di persentase penduduk miskin 8,79 dan di tahun 2019 di angka 352.593 sedangkan di jumlah penduduk miskin 14,8 dan di persentase penduduk miskin 8,6 dan di tahun 2020 di angka 383.167 sedangkan di jumlah penduduk miskin 14,66 dan di persentase penduduk miskin 8,35 dan di tahun 2021 di angka 399.139 sedangkan di jumlah penduduk miskin 16,22 dan di persentase penduduk miskin 8,88 dan di tahun 2022 di angka 432.959 sedangkan di jumlah penduduk miskin 16,44 dan di persentase penduduk miskin 8,8 dan di tahun 2023 di angka 471,841 sedangkan di jumlah penduduk miskin 16,53 dan di persentase penduduk miskin 8,67

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima, 2016–2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	293.048	15,42	9,51
2017	299.346	15,36	9,27
2018	323.187	14,84	8,79
2019	352.593	14,8	8,6
2020	383.161	14,66	8,35
2021	399.139	16,22	8,88
2022	432.959	16,44	8,8
2023	471.841	16,53	8,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia,

Pada tahun 2023, Kota Bima dengan populasi mencapai 161.362 jiwa, sebanyak 8,67 persen dari total penduduk berada dalam kondisi miskin. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada angka 8,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi beberapa masyarakat Kota Bima membaik. Akan tetapi, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Bima tahun 2023 meningkat menjadi 0,33 dari sebelumnya 0,27 sehingga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bima, 2016–2023

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	2,08	0,65
2017	1,3	0,31
2018	1,55	0,41
2019	1,58	0,36
2020	0,60	0,12
2021	1,12	0,21
2022	1,28	0,27
2023	1,50	0,33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia

D. SIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena sosial kompleks yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam suatu masyarakat. Fenomena ini sering terlihat dalam bentuk statistik seperti koefisien Gini yang menunjukkan seberapa besar kesenjangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi pada banyak aspek kehidupan perekonomian, antara lain pendapatan pribadi, aset rumah tangga, akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan dampak yang luas dan kompleks terhadap masyarakat, termasuk meningkatkan ketegangan sosial, mengurangi kohesi sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sayekti & Research, 2017). Ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Bima dapat tercermin dari ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana wilayah perdesaan seringkali mempunyai akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, ketimpangan juga tercermin dalam kesenjangan antar kelompok ekonomi seperti pengusaha kecil dan korporasi besar, serta dalam akses terhadap layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan pasar.

Oleh karena itu, peningkatan tingkat pendidikan penduduk menjadi prioritas dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini. Penting untuk mencatat bahwa peran pendidikan tidak hanya terbatas pada tingkat pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, kualitas pendidikan juga menjadi faktor krusial. Dalam rangka mengatasi kemiskinan, perlu adanya pembaruan dalam sistem pendidikan di Kota Bima. (Sumberdaya, n.d.) Ini termasuk

perbaikan dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru yang berkualitas, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pembaruan ini akan membantu memastikan bahwa anak-anak dan remaja menerima pendidikan berkualitas yang akan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang lebih baik dan memberikan peluang untuk meraih pendapatan yang lebih layak untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, perlu pendekatan yang komprehensif yang memperhitungkan semua dimensi ini dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan di Kota Bima dan daerah-daerah sejenis, penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan dan peluang yang lebih merata. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, pekerjaan yang layak, serta pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan program-program perlindungan sosial dan bantuan bagi kelompok-kelompok rentan juga dapat membantu mengurangi dampak buruk dari ketimpangan ekonomi terhadap kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak serta teman kelompok saya yang selalu memberikan semangat yang sangat luar biasa dan memberikan dukungan kepada saya untuk bisa menyelesaikan penelitian ini serta terima kasih buat bapak dosen yang sudah mengajarkan saya dalam proses penyusunan penelitian ini, Semoga penelitian yang saya buat bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

REFERENSI

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Aufa Nadya¹, S. (2019). KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN. 27(1), 37–52.
- Di, P. P. K. P., & Penanae, K. (2021). Kamaluddin | Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ... 1. *Jurnal Administrasi Negara*, 2, 1–21.
- Fardi, M., Pratama, I. N., & Mataram, U. M. (2023). *Journal of Social and Policy Issues* Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. 3.
- Hariani, P. (2019). Analisis ketimpangan ekonomi dan pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas sumatera utara. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 56–76.
- Indris, Kamal, S. dan S. H. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(01), 41–62.
- Inka Nusamuda Pratama Siti Rahmawati, I. N. P. (2023). Pengaruh Penggunaan Transportasi Berkelanjutan Terhadap Kualitas Udara Dan Kesejahteraan Masyarakat. *JEPTEC: Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1(2), 90–99.
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>

- Kebijakan, I., & Kemiskinan, P. (2008). 103 Tauhid | Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan....
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan dan Akses Informasi : Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas? *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *EBISMEN : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 248-253.
- Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Labor Market Brief Februari 2021 ISSN. 1-7.
- Pratama, I. N. (2023a). Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. 1(2), 143-153.
- Pratama, I. N. (2023b). Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram : Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. 2(April), 1216-1222.
- Pratama, I. N. (2023c). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61-77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55-66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Salwa Fadhilah Haya, Tiara Fadilah, Sri Rahayu, & Juliana Nasution. (2022). Dampak Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 55-68. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.260>
- Sayekti, N. W., & Penelitian, P. (2017). KETIMPANGAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN. 2(1), 1-10.
- Sumberdaya. (n.d.). Kemiskinan di indonesia dan solusinya. 1-18.
- Sunaryon N.Tuah. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Regional Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(2), 182-193. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>